

**SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGGEREBEKAN  
BERSIFAT ANARKIS YANG DILAKUKAN OLEH  
ORMAS FPI DI KOTA MAKASSAR**



**OLEH :**

**RADEN ARYO SETO WIBOWO  
B 111 07 270**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa dibawah ini :

**Nama : RADEN ARYO SETO WIBOWO**

**Nim : B111 07 270**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Judul : Tinjauan Kriminologis terhadap penggerebekan  
bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI di  
Kota Makassar.**

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

**Makassar, Agustus 2013**

**Mengetahui,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Muhadar. S.H, M.H.**  
**NIP. 19590317 198804 1 002**

**Amir Ilyas, S.H, M.H.**  
**NIP. 19800710 200604 1 001**

## ABSTRAK

**Raden Aryo Seto Wibowo** (B111 07 270), dengan judul skripsi “**Tinjauan Kriminologis terhadap penggerebekan bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI di Kota Makassar**” di bawah bimbingan Bapak **Muhadar** sebagai pembimbing I dan Bapak **Amir Ilyas** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggerebekan yang bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI di Kota Makassar dan untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Makassar dalam menanggulangi penggerebekan yang bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis serta pendekatan normatif, yaitu penelitian untuk mengkaji kaedah dan asas hukum. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk mengkaji mengenai arti dan maksud berbagai kaidah hukum yang berlaku mengenai Perjudian dalam sistem pidana di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, **Pertama**, Dampak yang ditimbulkan di masyarakat adalah adanya rasa was-was dan tidak aman, serta menimbulkan keresahan. Sehingga muncul yang namanya ketakutan ataupun pembelaan diri berupa pertempuran massa yaitu masyarakat melawan FPI, **Kedua**, Tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penggerebekan yang bersifat anarkis adalah 3 langkah yaitu pre-emptif, preventif dan represif

## Ucapan Terimah Kasih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT penguasa alam semesta atas segala limpahan rahmat, taufik, inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul “***Tinjauan Kriminologis terhadap penggerebekan bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI di Kota Makassar***”.

Shalawat dan salam yang tak kunjung henti kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya ketakwaan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengarungi hidup yang fana sehingga mengantarkan penulis untuk tahu akan arti kehidupan dan cinta yang hakiki.

Pertama-tama penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua *Penulis* atas segala kasih sayang, cinta kasih dan dukungannya yang tiada henti sehingga membentuk kepribadian dan kedewasaan penulis dalam meraih cita. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang-Nya sebagaimana kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.,DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof.Dr. Ir. Abrar, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Romy Librayanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar. S.H, M.H. selaku Pembimbing I serta Amir Ilyas, S.H, M.H. selaku Pembimbing II penulis, terima kasih atas kesabaran, keikhlasan dan keteguhannya dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya dosen pada bagian Hukum Pidana.
6. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Rekan-rekan angkatan EKSTRADISI 2007 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsinya baik itu moral maupun materil dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya semoga keikhlasan yang telah dipersembahkan kepada penulis mendapat rahmat dan hidayah dari yang maha mengetahui. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Karenanya, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Tak ada gading yang retak, tak ada manusia yang tak sempurna apabila ada kesalahan dalam penulisan ini mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar. Agustus 2013

P e n u l i s

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMAH KASIH .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian	
1. Kriminologi.....	7
2. Pidana.....	9
3. Tindak Pidana.....	12
4. Ormas.....	15
4. Ormas FPI.....	16
6. Anarkis.....	19
D. Teori-teori Sebab Terjadinya Kejahatan	
1. Perspektif Sosiologis.....	22
2. Perspektif Biologis.....	25
3. Perspektif Psikologis.....	26
4. Perspektif Lain.....	27
D. Teori-teori Penanggulangan Kejahatan	
1. Pre-Emtif.....	33
2. Preventif.....	33
3. Represif.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Sifat Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36

C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dampak Penggerebekan yang Bersifat Anarkis yang dilakukan oleh Ormas FPI di Kota Makassar .....	40
B. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Makassar dalam menanggulangi penggerebekan yang bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI dikota Makassar....	43
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.

Hukum bukan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang menikmati saja, bukan pula suatu kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial-rasional tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi mati karena mati kefungsiannya. Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganannya itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih khusus mengenai hukum pidana, maka pengertian hukum pidana yang diungkapkan Simons dalam bukunya *Leerboek Nederlands strafrecht*, memberikan definisi sebagai berikut<sup>1</sup>

“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.

Dari definisi di atas maka dapatlah dijabarkan bahwa hukum pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>[http://books.google.co.id/books?id=ffOnLAE1pqEC&pg=PR23&lpg=PR23&dq=Leerboek+Nederlands+strafrecht&source=bl&ots=eEkgL\\_ojkz&sig=J5qQUIZTTk2\\_tID4lGBB6UmGi-Y&hl=en&sa=X&ei=U-oQUY\\_yJsmmrAfJzYHADQ&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Leerboek%20Nederlands%20strafrecht&f=false](http://books.google.co.id/books?id=ffOnLAE1pqEC&pg=PR23&lpg=PR23&dq=Leerboek+Nederlands+strafrecht&source=bl&ots=eEkgL_ojkz&sig=J5qQUIZTTk2_tID4lGBB6UmGi-Y&hl=en&sa=X&ei=U-oQUY_yJsmmrAfJzYHADQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Leerboek%20Nederlands%20strafrecht&f=false)

1. Adanya perbuatan pidana, perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.
2. Adanya pidana, penderitaan atau nestapa yang dibebankan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Adanya pelaku atau orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut aturan-aturan hukum pidana yang berlaku.

Ketiga unsur-unsur tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga harus ada dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana, dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum yang mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan.

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat.

Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas.

Dalam system kenegaraan Indonesia dikenal dengan demokrasi, dimana kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, hal itu lah yang menyebabkan bebasnya orang berpendapat dan berkumpul untuk membuat organisasi. Dalam hal ini masyarakat yang dikenal sebagai

masyarakat demokratis berlomba-lomba untuk membuat organisasi guna menyatukan cita-cita, visi dan misi.

Lahirnya berbagai macam organisasi dinegara ini juga dijamin oleh UUD 1945 asalkan tidak membahayakan kedaulatan Negara dan tidak melanggar hukum. Yang ingin menjadi pusat perhatian dalam skripsi ini adakah organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI), dimana dimedia baik dimedia cetak maupun elektronik sering sekali disorot.

FPI sebagai organisasi Islam tentulah sangat menentang yang dilarang oleh Islam itu sendiri seperti Minuman keras, pelacuran, perjudian dan bahkan warung makan yang buka pada siang hari dibulan puasa. Dalam konsep nya mungkin sudah tepat, najun baru-baru ini terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh FPI dikota Makassar yang berujung anarkis, yang semestinya organisasi ini menjadi pembantu petugas kepolisian untuk memberantas perjudian yang juga dilarang dalam Kitab Undsng-undang Hukum Pudana (KUHP) Pasal 303 malah berujung anarkis. FPI melakukan tindakan Main hakim sendiri dengan ara memporak-porandakan pasar malam yang ditengarai didalamnya terdapat praktik perjudian. Hal ini malah berbalik menjadi pelanggaran bagi ormas FPI karena melakukan pengrusakan yang jelas-jelas tidak diperbolehkan dalam KUHP.

Oleh karena itu penulis mengambil judul Tinjauan kriminologis terhadap penggerebekan bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI dikota Makassar.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak penggerebekan yang bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI dikota Makassar?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Makassar dalam menanggulangi penggerebekan yang bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI dikota Makassar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dampak penggerebekan yang bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI dikota Makassar.
2. Untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Makassar dalam menanggulangi penggerebekan yang bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI dikota Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat yang berupa :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan penggerebekan

yang bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

## 2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana orang yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus penggerebekan yang bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI bias diminimalisir. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam menindaki tindakan penggerebekan anarkis tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

##### 1. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni "*Crimen*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan.<sup>2</sup>

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian kriminologi, berikut ini Penulis kemukakan pandangan beberapa sarjana terkemuka, antara lain:

Edwin H. Sutherland sebagaimana dikutip A.S. Alam mengartikan "kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial".<sup>3</sup>

Menurut W.A. Bonger "kriminologi adalah

"ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya".<sup>4</sup>

Menurut J. Constant "kriminologi adalah

---

<sup>2</sup> A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 1

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.2

“ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.<sup>5</sup>

WME.Noach mendefinisikan “kriminologi adalah

“ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.<sup>6</sup>

Sutherland, kriminologi adalah

“keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut.”<sup>7</sup>

Selanjutnya menurut Wilpang Savitz dan Johnston, Kriminologi adalah

“kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.<sup>8</sup>

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan juga

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Yesmil Anwar & Andang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. xviii

<sup>8</sup> *Ibid.*



untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku . Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

## **2. Pengertian Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.<sup>9</sup>

Menurut Andi Hamzah,<sup>10</sup> ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman<sup>11</sup> adalah istilah umum yang dipergunakan

---

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), h. 1.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 27.

<sup>11</sup> Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dengan *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan murid, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan

untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>12</sup>

Menurut Satochid Kartanegara,<sup>13</sup> bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

---

kepada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini, juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dst. Lihat Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), h. 20.

<sup>12</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, (Bandung: Binacipta, 1987), h. 17.

<sup>13</sup> Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, h. 275-276.

- 1) Jiwa manusia (*leven*);
- 2) Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
- 3) Kehormatan seseorang (*eer*);
- 4) Kesusilaan (*zede*);
- 5) Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*);
- 6) Harta benda/kekayaan (*vermogen*).

Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel:

Menurut van Hamel:<sup>14</sup>

*“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.”*

*Artinya:*

“suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), h. 34.

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “delik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.<sup>15</sup> Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberikan definisi sebagai berikut.

Simons

“Dalam rumusannya *strafbaar feit* itu adalah “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.<sup>16</sup>

Alasan dari Simons mengapa harus dirumuskan seperti di atas karena:

a. untuk adanya suatu *strafbaar feit* diisyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-

---

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cetakan Ke-I, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 37

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang (buku I), *op. cit.*, hal.185, lihat juga Satochid Kartanegara, *op. cit.*, hal. 74

undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

b. agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;

c. setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

#### E. Utrecht

“Menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)

Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum”.

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan

hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Berdasarkan definisi teoritis maka perbuatan pidana adalah pelanggaran norma/kaedah/tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan dari sisi perundang-undangan, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat ini biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi delik (*an objective of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*). Di sini berlaku “tidak pidana tanpa kesalahan” (*kiene strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). *Culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.

#### 4. Ormas

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1985 Pasal 1 menegaskan Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>17</sup>

Namun undang-undang yang baru tentang ormas masih sedang diperdebatkan di DPR yang dimana muncul perdebatan alot tentang berbagai hal yang menyangkut tentang ormas.

##### 2. Asas dan tujuan

Undang- undang nomor 8 tahun 1985 tentang ormas mengatur tentang asas dan tujuan ormas

##### Pasal 2

(1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

---

<sup>17</sup><http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan%20Perundang-undangan/1%29%20Bidang%20Politik%20Dalam%20Negeri/8%29%20Ormas/UU%20NOMOR%2008%20TAHUN%201985%20Tentang%20ORGANISASI%20KEMASYARAKATAN.pdf>

(2) Asas sebagahnana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### Pasal 3

Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya dalun rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

Organisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam Pasal Anggaran Dasarnya.

## **5. Ormas FPI**

Menurut pendapat ketua FPI Habieb Rizieq Perspektif FPI adalah Posisi FPI menjadi semacam Pressure Group di Indonesia, untuk mendorong berbagai unsur pengelola negara agar berperan aktif dalam memperbaiki dan mencegah kerusakan moral dan akidah umat Islam, serta berinisiatif membangun suatu tatanan sosial, politik & hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.<sup>18</sup>

Posisi dan Potensi Islam Perlu Dilihat Dalam Perspektif Yang Benar dan Adil. Memahami ajaran Islam dalam perspektif yang benar adalah

---

<sup>18</sup> <http://fpi.or.id/?p=tentangfpi&mid=1>



prasyarat untuk memahami motif aksi dan reaksi umat Islam terhadap berbagai persoalan sosial dan politik. Islam bukanlah agama yang mengajarkan nilai-nilai permusuhan dan kebencian apalagi anarkisme dan terorisme. Sebaliknya Islam mengajarkan nilai-nilai akhlak yang universal, nilai-nilai baku moral yang kompatibel diaplikasikan bagi seluruh umat manusia. Dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran, dinyatakan bahwa keberadaan Islam di muka bumi ini merupakan rahmat (kebaikan) yang bisa dinikmati semua makhluk yang ada di alam semesta ini (rahmatan lil alamin). Nilai-nilai ajaran Islam juga mencakup wilayah kebaikan yang sangat luas, mulai dari petunjuk cara bersosialisasi yang lebih baik, nilai-nilai akhlak yang memuliakan esensi hidup manusia, sistim politik dan hukum yang adil, pola perdagangan yang adil hingga konsep pengelolaan energi dan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Kehadiran gerakan Islam terjadi karena adanya ketidakadilan yang dialami umat Islam dan adanya gerakan-gerakan lokal dan global yang mengancam nilai-nilai akidah (keimanan) umat Islam. Upaya pembelaan umat Islam secara terorganisasi merupakan hal mendesak yang dilakukan karena globalisasi yang ada saat ini sudah menjelma menjadi penjajahan gaya baru, melalui upaya-upaya pemaksaan sistim politik, budaya dan sosial ke bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Upaya-upaya pengrusakan dari dalam umat Islam sendiri perlu dihadapi dengan tegas, misalnya upaya pembiasaan makna pluralitas atau upaya liberalisasi ajaran Islam. Islam sangat menghargai adanya pluralitas dalam hubungan

sosial antar berbagai bangsa termasuk hubungan sosial antar umat beragama, namun menolak tegas pluralitas agama yaitu upaya-upaya mencari kesamaan prinsip diantara berbagai agama yang ada. Toleransi antar umat beragama hendaknya difokuskan pada upaya-upaya mencari pola untuk saling menghormati atas perbedaan yang ada tanpa rasa permusuhan, dan ini jelas terkandung dalam kitab suci umat Islam, Al-Qur'an, dalam surat Al-Kafirun, "untukmu agamamu, dan untukku agamaku".

#### Visi dan Misi FPI

Sesuai dengan latar belakang pendiriannya, maka FPI mempunyai sudut pandang yang menjadi kerangka berfikir organisasi ( visi ), bahwa penegakan amar ma'ruf nahi munkar adalah satu-satunya solusi untuk menjauh-kan kezholiman dan kemunkaran. Tanpa penegakan amar ma'ruf nahi munkar, mustahil kezholiman dan kemunkaran akan sirna dari kehidupan umat manusia di dunia.

FPI bermaksud menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara káffah di segenap sektor kehidupan, dengan tujuan menciptakan umat sholihat yang hidup dalam baldah thoyyibah dengan limpahan keberkahan dan keridhoan Allah 'Azza wa Jalla. Insya Allah. Inilah misi FPI.

Jadi, Visi Misi FPI adalah penegakan amar ma'ruf nahi munkar untuk penerapan Syari'at Islam secara káffah.

## 6. Definisi Anarkis

Sering kali kita mendengar kata anarki yang digunakan untuk menggambarkan aksi kerusuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang, namun apa arti sebenarnya mengenai kata anarki tersebut?. Anarkisme berasal dari kata dasar "anarki" dengan imbuhan -isme. Kata anarki merupakan kata serapan dari anarchy (bahasa Inggris) atau anarchie (Belanda/Jerman/Perancis), yang berakar dari kata bahasa Yunani, anarchos/anarchein. Ini merupakan kata bentukan a- (tidak/tanpa/nihil/negasi) yang disisipi /n/ dengan archos/archein (pemerintah/kekuasaan atau pihak yang menerapkan kontrol dan otoritas - secara koersif, represif, termasuk perbudakan dan tirani); maka, anarchos/anarchein berarti "tanpa pemerintahan" atau "pengelolaan dan koordinasi tanpa hubungan memerintah dan diperintah, menguasai dan dikuasai, mengepalai dan dikepalai, mengendalikan dan dikendalikan, dan lain sebagainya". Bentuk kata "anarkis" berarti orang yang mempercayai dan menganut anarki, sedangkan akhiran -isme sendiri berarti paham/ajaran/ideologi.

Menurut Peter Kropotkin "Anarkisme adalah sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan. Ia dimulai di antara manusia, dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia", sedangkan menurut Errico Malatesta "Penghapusan eksploitasi dan penindasan manusia hanya bisa dilakukan lewat penghapusan dari kapitalisme yang rakus dan pemerintahan yang

menindas". Menurut definisi lain, Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan. secara spesifik pada sektor ekonomi, politik, dan administratif, Anarki berarti koordinasi dan pengelolaan, tanpa aturan birokrasi yang didefinisikan secara luas sebagai pihak yang superior dalam wilayah ekonomi, politik dan administratif (baik pada ranah publik maupun privat).

Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa hirarkis (baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial). Para Anarkis berusaha mempertahankan bahwa anarki, ketiadaan aturan-aturan, adalah sebuah format yang dapat diterapkan dalam sistem sosial dan dapat menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sosial. Anarkis melihat bahwa tujuan akhir dari kebebasan dan kebersamaan sebagai sebuah kerjasama yang saling membangun antara satu dengan yang lainnya. Atau, dalam tulisan Bakunin yang terkenal yaitu "kebebasan tanpa sosialisme adalah ketidakadilan, dan sosialisme tanpa kebebasan adalah perbudakan dan kebrutalan". Dalam sejarahnya, para anarkis dalam berbagai gerakannya kerap kali menggunakan kekerasan sebagai metode yang cukup ampuh dalam memperjuangkan ide-idenya, seperti para anarkis yang terlibat dalam kelompok Nihilis di Rusia era Tzar, Leon Czolgosz, grup N17 di Yunani. Slogan para anarkis Spanyol pengikutnya

Durruti yang berbunyi "Terkadang cinta hanya dapat berbicara melalui selongsong senapan".

Yang sangat sarat akan penggunaan kekerasan dalam sebuah metode gerakan. Penggunaan kekerasan dalam anarkisme sangat berkaitan erat dengan metode propaganda by the deed, yaitu metode gerakan dengan menggunakan aksi langsung (perbuatan yang nyata) sebagai jalan yang ditempuh, yang berarti juga melegalkan pengrusakan, kekerasan, maupun penyerangan. Selama hal tersebut ditujukan untuk menyerang kapitalisme ataupun negara. Namun demikian, tidak sedikit juga dari para anarkis yang tidak sepakat untuk menjadikan kekerasan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh. Dalam bukunya *What is Communist Anarchist*, pemikir anarkis Alexander Berkman menulis "Anarkisme bukan Bom, ketidakteraturan atau kekacauan. Bukan perampokan dan pembunuhan. Bukan pula sebuah perang di antara yang sedikit melawan semua. Bukan berarti kembali kekehidupan barbarisme atau kondisi yang liar dari manusia. Anarkisme adalah kebalikan dari itu semua. Anarkisme berarti bahwa anda harus bebas. Bahwa tidak ada seorangpun boleh memperbudak anda, menjadi majikan anda, merampok anda, ataupun memaksa anda. Itu berarti bahwa anda harus bebas untuk melakukan apa yang anda mau, memiliki kesempatan untuk memilih jenis kehidupan yang anda mau serta hidup di dalamnya tanpa ada yang mengganggu, memiliki persamaan hak, serta hidup dalam perdamaian dan harmoni seperti saudara. Berarti tidak boleh ada perang, kekerasan,

monopoli, kemiskinan, penindasan, serta menikmati kesempatan hidup bersama-sama dalam kesetaraan".

Dari berbagai selisih paham antar anarkis dalam mendefinisikan suatu ide kekerasan sebagai sebuah metode, kekerasan tetaplah bukan merupakan suatu ide eksklusif milik anarkisme, sehingga anarkisme tidak bisa dikonotasikan sebagai kekerasan, seperti makna tentang anarkisme yang banyak dikutip oleh berbagai media di Indonesia yang berarti sebagai sebuah aksi kekerasan. Karena bagaimanapun kekerasan merupakan suatu pola tingkah laku alamiah manusia yang bisa dilakukan oleh siapa saja dari kalangan apapun.<sup>19</sup>

## **B. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan**

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum.

Berikut ini teori penyebab kejahatan<sup>20</sup>

### **1. Perspektif Sosiologis**

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu :

---

<sup>19</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

<sup>20</sup> teori penyebab kejahatan (A. S. Alam dan Amr Ilyas, 2010 : 67-75)

strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. Teori strain dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah. Pada teori penyimpangan budaya menyatakan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagai konsekuensinya manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional. Sudah umum diterima bahwa objek

kriminologi adalah norma-norma kelakuan (tingkah laku) yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kejahatan (crime) sebagai salah satu dari padanya masih merupakan bagian yang terpenting. Dari sudut pandang sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya Disorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku kejahatan, sama sekali tidak mempedulikan keselamatan, kesejahteraan ataupun barang milik orang lain.

Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih berkuasa umumnya bersatu dan bergabung dengan pegawai-pegawai pemerintah yang korup dan dengan demikian mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan melalui saluran pemerintahan.

Sosiologi modern sangat menekankan pada mempelajari struktur dan jalannya masyarakat sekarang ini. Bila dilihat dari sosiologi maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi sosial. Karena pelaku kejahatan bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum, Undang-Undang, Ketertiban dan Kesejahteraan sosial. dan oleh karena itulah kejahatan merupakan salah satu bagian dari disorganisasi sosial yang perlu diperhatikan. Dalam *culture conflict theory* Thomas Sellin menyatakan



bahwa setiap kelompok memiliki *conduct norm*-nya sendiri dan dari *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain. Seorang individu yang mengikuti norma kelompoknya mungkin saja dipandang telah melakukan suatu kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat dominan. Menurut penjelasan ini perbedaan utama antara seorang kriminal dengan seorang non kriminal adalah bahwa masing-masing menganut *conduct norms* yang berbeda. Sebaliknya dalam teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

## **2. Perspektif Biologis**

“Cesare Lombroso” seorang Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*” ia menjelaskan kejahatan dari mashab klasik menuju mashab positif. Perbedaan signifikan antara mashab klasik dan mashab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor, dimana para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidak matangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu dll. Sementara dari tokoh biologis mengikuti tradisi Charles Goring dalam upaya menelusuri tentang tingkah laku criminal.

Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu :

- a. Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. Occasional criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- d. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. Meskipun teori Lombroso dianggap sederhana dan naif untuk saat ini.

### **3. Perspektif Psikologis**

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka berada.

Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :

- a. tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis

#### **4. Perspektif Lain**

##### **➤ Teori Labeling**

Para penganut *labeling theory* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun secara luas.

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pandangan individu pada diri mereka sendiri.

Tokoh-tokoh yang menganut teori labeling antara lain :

1. Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:
  - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label
  - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
  - a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal

- b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan
- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa
- d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal
- e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya
- g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat

- i. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*
4. Lemert, telah memperkenalkan suatu pendekatan yang berbeda dalam menganalisis kejahatan sebagaimana tampak dalam pernyataan di bawah ini:

*“This is large turn away from the older sociology which tended to rest heavily upon the idea that deviance leads to social control. I have come to believe that the reserve idea. i.e. social control leads to deviance, equally tenable and the potentially richer premise for studying deviance in modern society.”*

5. Frank Tannenbaum, memandang proses kriminalisasi sebagai proses memberikan label, menentukan, mengenal, memencilkan, menguraikan, menekankan / menitikberatkan, membuat sadar atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010 : 67-70).

#### ➤ **Teori Konflik**

Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial

yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan “*for the general good*” (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.

Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

➤ **Teori Radikal**

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik; pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

Yang termasuk penganut teori radikal:

.Richard Quinney<sup>21</sup>

“Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis”

William Chambls<sup>22</sup>,

Menurut Chambls ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah pada beberapa butir di bawah ini:

1. Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah antara golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk
2. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang mereka alami
3. Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang menjurus kepada fungsi kejahatan

Melalui pemahaman dari teori-teori di atas, baik refleksi kejahatan model konsensus maupun refleksi kejahatan model konflik memungkinkan dapat diikutinya pergeseran perspektifnya.

---

<sup>21</sup> (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010 : 74)

<sup>22</sup> (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010 : 75)



## **C. Teori-teori Penanggulangan kejahatan**

### **1. Pre-Emtif**

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

### **2. Preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan dihilangkan.

### **3. Represif**

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010 : 79-80).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Sifat Penelitian**

Dalam setiap penelitian pasti menggunakan metode penelitian, baik dalam mengumpulkan data maupun dalam menganalisis data yang telah ditemukan. Sifat penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian murni dan penelitian terapan. Pada penelitian ini, penulis memilih penelitian murni karena penelitian ini bertujuan untuk membangun pengetahuan. Biasanya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan hal baru.

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis serta pendekatan normatif, yaitu penelitian untuk mengkaji kaedah dan asas hukum. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk mengkaji mengenai arti dan maksud berbagai kaidah hukum yang berlaku mengenai Perjudian dalam sistem pidana di Indonesia. Pendekatan normatif yaitu, yang berkaitan dengan perundang-undangan yang menyangkut ormas berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa, Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian penggerebekan bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI di kota Makassar menggunakan metode wawancara dengan para penegak hukum serta pakar hukum khususnya di bidang hukum pidana sehingga lokasi wawancara disesuaikan dengan kesepakatan bersama dengan pihak yang terkait.

Selain itu, penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga lokasi penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan dan internet. Perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan yang ada di Makassar, khususnya Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, serta perpustakaan pribadi (koleksi buku yang dimiliki penulis).

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebelum menganalisis data melalui metode pustaka dan metode wawancara secara langsung. Pengumpulan data yang dilakukan dengan metode pustaka, yaitu dengan membaca beberapa buku pendukung, serta tulisan lain yang ada kaitan dengan penelitian.

Metode wawancara diperoleh dari para penegak hukum serta pakar hukum khususnya di bidang hukum pidana dan mencatat data yang mendukung penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada. Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan permasalahan.

Adapun data-data yang dikumpulkan dibagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penegak hukum (Polisi), para pakar hukum khususnya di bidang hukum pidana, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki keterkaitan. Cara yang ditempuh untuk memahami data primer adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat wawancara dengan penegak hukum (Polisi), para pakar hukum khususnya di bidang hukum pidana, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- b. Menganalisis hasil wawancara dengan penegak hukum (Polisi), para pakar hukum khususnya di bidang hukum pidana, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- c. Memaparkan dan menjelaskan hasil wawancara dengan penegak hukum (Polisi), para pakar hukum khususnya di bidang hukum pidana, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang atau bahan banding guna memahami data primer. Data sekunder

yang penulis gunakan dalam pengkajian ini ditemukan dari berbagai sumber antara lain:

- a. Skripsi yang ada hubungannya dengan objek yang dikaji.
- b. Buku-buku, dokumen, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil seminar atau lokakarya menyangkut tindak pidana Perjudian serta semua buku atau data tersurat yang penulis anggap dapat menunjang dalam proses pengkajian.

#### **D. Analisis Data**

Data-data yang berhubungan dengan enggerebekan anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menyimpulkannya.

Perangkat yang dianalisis atau dikaji yakni data yang termasuk dalam kelompok data primer maupun sekunder. Analisis data ini terfokus pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia menyangkut tindakan anarkis dan pengrusakan didepan umum atau hukum materiil dan formil lainnya.

Pada masyarakat Indonesia terdapat suatu paradigma yang menyatakan bahwa hukum menjadi pengarah atau sarana pembangunan. Namun, kenyataan menunjukan bahwa hukum tertinggal di belakang pembangunan. Untuk menemukan mengapa terjadi kesenjangan serta bagaimana menghilangkan kesenjangan, perlu dilakukan penelitian.

Jawaban atas penelitian tersebut, ada yang bersifat teoritis belaka, yaitu sekedar untuk menemukan atau menguji keabsahan konsep-konsep atau teori-teori yang sudah ada. Ada pula jawaban yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau dijadikan dasar pemecahan masalah nyata atau kongkrit. Misalnya, untuk mengetahui secara tepat apakah berbagai perundang-undangan masih mampu mendukung pembangunan di Indonesia.

Jadi, penulis membandingkan antara *das sollen* dengan *das sein* untuk mengetahui dampak penggerebekan bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI di kota Makassar, penanganan serta penegakan hukum terhadap tindakan tersebut yang terjadi di Indonesia khususnya di daerah Makassar.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Dampak Penggerebekan Yang Bersifat Anarkis Yang Dilakukan Oleh Ormas FPI Dikota Makassar**

Setelah penulis melakukan penelitian di kepolisian, kejaksaan dan di masyarakat, penulis berpendapat bahwa dampak penggerebekan dari ormas FPI sangatlah merugikan masyarakat. Adapun penulis uraikan sebagai berikut

Selama tahun 2011 sampai tahun 2013 ada tercatat 20 penggerebekan yang dilakukan oleh FPI selaku ormas islam. Kesemuanya rata-rata berujung anarkis, hal ini disebabkan karena banyaknya anggota dari FPI yang langsung berdatangan dan melakukan penggeledahan disertai pengrusakan. Tempat yang digerebek biasanya adalah tempat yang ditengarai ada praktik judi, maksiat, dan tempat penjualan miras. Berikut adalah tempat-tempat yang sempat diliput media.

Puluhan massa Front Pembela Islam (FPI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggerebek kedai tuak dan beberapa tempat maksiat di Makassar, Selasa (29/3/2011). Massa FPI yang berkonvoi dengan sepeda motor ini memulai aksinya dari Jl Sungai Kelara, persis di belakang rumah jabatan Gubernur Sulsel.

Massa FPI lebih dahulu mendatangi kedai tuak di Jl Laiya. Sayangnya, kedai kumuh berdinding seng ini sudah ditinggalkan pemiliknya sejak siang harinya. Massa FPI hanya menyita ratusan botol bekas air mineral, sisa wadah tuak. Para laskar FPI kemudian menyerahkan ratusan botol bekas tuak itu ke Polsek Wajo, di Jl Irian, Makassar.

Selain membongkar kedai tuak, massa FPI juga mengusir pasangan yang sedang berkencan di Taman Macan, termasuk mengintimidasi para PSK yang sedang mangkal di Jl Nusantara. Saat



diteriaki oleh massa FPI para PSK yang setiap malam mencari peruntungan dari pria-pria hidung belang ini lari berhamburan menyelamatkan diri.

Selain PSK, para waria yang mejeng di depan lapangan Karebosi tidak luput dari hardikan massa FPI. Waria yang memakai gaun seksi ini lari tunggang langgang saat dikejar beberapa anggota FPI. Beruntung para waria ini lebih cepat larinya dibanding anggota FPI yang rata-rata menggunakan sorban dan peci.

Massa FPI sempat bersitegang dengan aparat kepolisian di Polsek Ujungpandang, di Jl Sultan Hasanuddin, saat massa FPI memaksakan diri untuk menemui tersangka kurir tuak yang sudah diamankan sehari sebelumnya bersama mobil van Suzuki Carry yang mengangkut 5 karung berisikan berbotol-botol tuak.

Menurut pimpinan rombongan FPI Sulsel, Ustadz Abdurrahman yang ditemui wartawan di sela aksinya, kedatangan mereka untuk membongkar lapak tuak yang sering dijadikan tempat mangkal para sopir angkot dan tukang-tukang becak yang gemar minum tuak ini untuk menegakkan amar makruf nahi munkar. Pentolan FPI di Makassar menyebutkan, banyaknya tindak kejahatan di Makassar bermula dari lapak-lapak tuak.

"Kami turun malam ini berkat laporan masyarakat yang sudah resah dengan adanya aktivitas jual beli tuak di lingkungannya, kami juga ingin mengingatkan masyarakat agar menjauhi perbuatan maksiat," pungkas Abdurrahman.

Usai menuntaskan aksinya di Polsek Ujungpandang dan Taman Macan, puluhan massa FPI kemudian kembali ke Basecamp-nya, di Jl Sungai Limboto, Makassar.<sup>23</sup>

Dari berita diatas dapat dilihat adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI, mereka melakukan penghancuran rumah yang diduga tempat penjualan tuak, mereka juga membubarkan pasangan muda-mudi yang lagi duduk di taman macan dan juga meneriaki para pekerja seks komersial yang berada ditempat lokalisasi, dengan dalih menegakkan amar makruf nahi munkar. Padahal dapat dilihat hal yang

---

<sup>23</sup><http://news.detik.com/read/2011/03/29/221421/1604156/10/fpi-sulsel-gerebek-kedai-tuak-dan-tempat-maksiat-di-makassar>. diakses pada 21 maret 2013 pada pukul 16.00

dilakukan oleh pasangan muda-mudi sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang, penghancuran yang dilakukan oleh ormas fpi termasuk dalam pelanggaran hukum. Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara Islam, karena prinsipnya dalam ad/art ormas fpi bertujuan untuk menegakkan syariah islam.

Belum lagi para anggota FPI ini melakukan penghancuran warung coto dijalan pettarani pada saat bulan puasa pada tahun 2012 lalu, mereka berdalih bahwa pada bulan ramadhan tidak boleh ada warung yang buka disiang hari. Padahal Negara sama sekali tidak melarang terbukanya warung makan pada bulan ramadhan disiang hari.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di polrestabes Makassar adalah sebagai berikut

Bapak Aiptu nawir menyatakan bahwa masyarakat merasa sangat dirugikan atas tindakan penggerebekan yang dilakukan fpi, mereka sama sekali tidak pernah meminta koordinasi dikepolisian, mereka langsung saja melakukan “aksinya” dijalan anuang kantor ahmadiyah dilakukan penggerebekan, warung coto dan penginapan. Mereka melakukan pengrusakan Bahkan sempat terjadi penikaman pada saat melakukan penggerebekan menggunakan pecahan botol sehingga pihak kepolisian menahan ketua ormas FPI kota Makassar yang bernama Abdurrahman S.H. beserta kedua temannya. Namun pada saat diinterogasi mereka menutup-nutupi nama teman-temannya, alasan mereka melakukan

kejahatan adalah untuk menegakkan syariah islam. Hal ini mengakibatkan mereka dikenai pasal 170 jo 351 dan 335 KUH Pidana.

Dari data dan wawancara diatas penulis kemudian menyimpulkan dampak yang dilakukan oleh ormas FPI sangatlah membuat resah masyarakat, karena mereka tidak punya wewenang untuk melakukan tindakan anarkis yang juga melanggar hukum.

Dampak yang ditimbulkan di masyarakat adalah adanya rasa was-was dan tidak aman, serta menimbulkan keresahan, karena seakan-akan ormas FPI tersebut tidak takut akan sanksi hukum dan selalu bertindak seenaknya.

## **2. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Makassar dalam menanggulangi penggerebekan yang bersifat anarkis yang dilakukan oleh ormas FPI dikota Makassar**

Setelah penulis melakukan penelitian di polrestabes kota Makassar, penulis mewawancarai bapak aiptu Nawir tentang tindakan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Beliau mengatakan bahwa yang dilakukan pihak kepolisian ada 3 langkah yaitu

### **1. pre-emptif**

Yang dimaksud dalam tindakan pre-emptif ini adalah pihak kepolisian mengumpulkan ketua-ketua ormas baik itu ormas keagamaan ataupun ormas yang lain untuk memberikan pengertian dan sosialisasi tentang tidak dibolehkannya tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti

kegiatan penggerebekan anarkis yang mengakibatkan rusaknya rumah warga.

## 2. Preventif

Dilakukan pencegahan-pencegahan berupa menempatkan intel dalam ormas-ormas yang dapat berpotensi mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran hukum, sehingga apabila terjadi tanda-tanda pergerakan ingin dibuatnya penggerebekan secara anarkis, intel tersebut dapat segera melaporkan tempat dimana akan terjadinya tindakan tersebut.

## 3. Refresif

Tindakan refresif adalah tindakan penindakan dimana pihak kepolisian harus melakukan penangkapan atau penahanan apabila terjadi ormas yang melakukan tindakan anarkisme, bahkan polisi harus melakukan tindakan-tindakan sesuai protap-protap yang telah ada.

Itulah tindakan-tindakan yang harus dilakukan pihak kepolisian apabila terjadi tindak pidana pada umumnya dan terkhusus dalam skripsi ini adalah apabila ada ormas fpi yang melakukan tindakan penggerebekan yang anarkis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:.

1. Dampak yang ditimbulkan di masyarakat adalah adanya rasa was-was dan tidak aman, serta menimbulkan keresahan. Sehingga muncul yang namanya ketakutan ataupun pembelaan diri berupa pertempuran massa yaitu masyarakat melawan FPI
2. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penggerebekan yang bersifat anarkis adalah 3 langkah yaitu pre-emptif, prventif dan represif.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran penulis mengenai Implementasi sebagai berikut:

1. Kepolisian haruslah menindaki secara tegas tanpa pilih kasih ormas yang melakukan penggerebekan anarkis karena itu sangat merugikan masyarakat
2. Jaksa dan hakim harus memberikan ancaman hukuman dan penjatuhan hukuman yang berat terhadap pemimpin dari ormas

yang melakukan kekacauan, agar terlihat adanya efek jerah kepada anggota yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Alam. A.S, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar
- C.S.T. Kansil. 2004. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Cetakan Ke-I. PT. Pradnya Paramita:Jakarta
- J.M. van Bemmelen. 1987. Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum.Bandung: Binacipta
- Lamintang. P.A.F. 1990. Dasar-dasar hukum pidana Indonesia . Sinar Baru: Bandung
- \_\_\_\_\_. 1984., Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico
- \_\_\_\_\_. 1990. Hukum pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru
- Marlang, Abdullah, dkk. 2009. Pengantar Hukum Indonesia. Makassar : AS Center
- Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta: Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni
- Prasetyo, Tegus. 2002. Sari hukum acara pidana 1 A. Yogyakarta: Mitra Prasaja
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. Bunga Rampai Hukum . Ichtiar Baru van Hoeve: Jakarta
- \_\_\_\_\_. 1989. Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat
- Satochid Kartanegara, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955
- Sudarto. 1986. Kapita selekta hukum pidana . Alumni:Bandung
- \_\_\_\_\_.1990. Hukum pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP

### **Sumber Lain**

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

<http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan%20Perundang-undangan/1%29%20Bidang%20Politik%20Dalam%20Negeri/8>

%29%20Ormas/UU%20NOMOR%208%20TAHUN%201985%20Tentang%20ORGANISASI%20KEMASYARAKATAN.pdf

[http://books.google.co.id/books?id=ffOnLAE1pqEC&pg=PR23&lpg=PR23&dq=Leerboek+Nederlands+strafrecht&source=bl&ots=eEkgL\\_ojkz&sig=J5qQUIZTTk2\\_tiD4lGbb6UmGi-Y&hl=en&sa=X&ei=U-oQUY\\_yJsmmrAfJzYHADQ&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Leerboek%20Nederlands%20strafrecht&f=false](http://books.google.co.id/books?id=ffOnLAE1pqEC&pg=PR23&lpg=PR23&dq=Leerboek+Nederlands+strafrecht&source=bl&ots=eEkgL_ojkz&sig=J5qQUIZTTk2_tiD4lGbb6UmGi-Y&hl=en&sa=X&ei=U-oQUY_yJsmmrAfJzYHADQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Leerboek%20Nederlands%20strafrecht&f=false)

<http://fpi.or.id/?p=tentangfpi&mid=1>

<http://news.detik.com/read/2011/03/29/221421/1604156/10/fpi-sulsel-gerebek-kedai-tuak-dan-tempat-maksiat-di-makassar>. diakses pada 21 maret 2013 pada pukul 16.00

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas